

**PARTISIPASI MASYARAKAT GAMPONG DALAM
PEMBANGUNAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG
DESA NO. 6 TAHUN 2014
DI KABUPATEN ACEH BARAT**

Veni Nella Syahputri, S.Pd., M.Pd

Universitas Teuku Umar, email: *veninellaputri@gmail.com*

Cut Irna Liyana, S.Pd I., MA

Universitas Teuku Umar, email: *cut.irnaliyana88@gmail.com*

Abstract

The aims of this study are to describe and to explain the community participation in development after existing and implementing Village Constitutions No. 16, 2014 in Aceh Barat, especially in Gampong Langung and Gampong Peunaga Rayeuk. Method used in this research is qualitative by data collecting techniques are depth interview, observation and documentation. This data is analyzed by using participation theory of Arnstein. The result of research shows that the community participation in these two gampongs, has been running in "partnership" level. This is sixth level of eight stages of participation. This level shows that community have had the power. Community in both gampong has been involved in development planning processes throuht meeting and musrenbang, in the implementation of development programs, also in monitoring and evaluating which are done informally by community and formally by gampong government. The partnership in Gampong Langung has been realized in the community entrepreneurship supported by gampong fund, that is the cultivation of catfish with the profit sharing system with gampong government. Another partnership is a tender process for infrastructure development that involves communities to participate in development. Gampong Langung also have an excellent product "Kue Khas Aceh" which has got a champion at the local, provincial and national levels. The Gampong Langung government also provides a revolving fund for business actors "Kue Khas Aceh" to support community efforts. While Gampong Peunaga Rayeuk with the planning of "catfish smoke" as well as cultivation of catfish as raw material. Catfish cultivation is focused on housewives as partners of gampong. Infrastructure development is also carried out by a tender process at Gampong Peunaga Rayeuk that involves the community.

Keywords: *Development, Participation*

A. Pendahuluan

Globalisasi dan kapitalisme telah berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama. Dampak globalisasi dirasakan di berbagai level, baik level elit maupun di level *grass root*. Sebagian level elit mungkin saja merasa diuntungkan untuk kepentingan bisnis mereka, namun level *grass root* justru merasa dirugikan, karena elit akan terus menekan masyarakat kelas bawah (*grass root*).

Negara dan bangsa ini sepertinya sulit sekali untuk terlepas dari jeratan globalisasi dan kapitalisme. Globalisasi dan kapitalisme diibaratkan sebagai rentenir yang telah „mencekik leher“ bangsa Indonesia tanpa kita sadari. Hingga saat ini, hutang luar negeri belum berakhir. Di satu sisi, hutang luar negeri ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Indonesia, namun disisi yang lain justru membawa dampak yang buruk bagi masyarakat Indonesia. Hutang Indonesia terhadap luar negeri akan terus bertambah seiring dengan pembangunan yang sedang berjalan di Indonesia. Ungkapan “tidak ada makan siang gratis” pun terus bergulir menanggapi isu ini. Hutang diberikan oleh asing untuk bangsa Indonesia, namun hasil bumi dan tambang akan di kuasai oleh asing dan untuk kepentingan asing pula. Hanya sebagian kecil saja masyarakat Indonesia yang dapat merasakan hasil bumi dan tambangnya.

Jika kita menganalisis dalam konteks lokal, Aceh juga tidak dapat melepaskan diri dari globalisasi dan kapitalisme. Persoalan konflik yang berjalan hampir 30 tahun, tentu saja berdampak pada masyarakat Aceh, baik psikis, pendidikan ekonomi, politik, kesehatan, sosial. Ditambah lagi, Aceh juga mengalami bencana alam gempa dan gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Tentu saja persoalan yang dirasakan begitu kompleks. Upaya-upaya pemulihan telah dilakukan baik pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur. Namun, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial tentu saja tidak mudah. Persoalan-persoalan sosial akan terus bertambah seiring dengan pembangunan dan kemajuan suatu daerah ataupun gampong.

Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menjawab persoalan tersebut. Pada BAB IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bagian ke Satu tentang Pembangunan Desa Pasal 78 disebutkan “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan".¹

Pemerintah melalui Undang-Undang Desa berupaya untuk membangun negara melalui gampong (desa). Dengan asumsi bahwa jika gampong sejahtera, maka negara secara otomatis menjadi negara yang sejahtera pula. Lahirnya Undang-Undang Desa menimbulkan pro dan kontra, baik dari kalangan akademisi, praktisi dan juga masyarakat. Sebagian menyambut positif dan tidak sedikit pula yang mengkritisnya. Terlepas dari dinamika tersebut, negara melalui Undang-Undang Desa ingin melakukan perubahan yang besar yaitu menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera (*Civil Society*).

Program pemerintah di era sekarang ini melalui Undang-Undang Desa diharapkan tidak mengalami kegagalan seperti pada masa lalu. Pemerintah saat ini telah mulai merubah konsep *top down* menjadi *bottom up*. Jika pada masa orde baru begitu banyak program-program pembangunan yang diimplementasikan, maka begitu banyak pula program-program pembangunan yang mengalami kegagalan secara proses. Kegagalan salah satunya adalah akibat tidak mendapatkan partisipasi yang sesungguhnya dari masyarakat penerima manfaat. Masyarakat hanya dimobilisasi dan menjadi objek dari setiap program-program pembangunan. Padahal jika merujuk pada teori-teori pembangunan masyarakat, maka setiap program pembangunan harus berorientasi pada proses, sekaligus mendapatkan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dan bukan berorientasi pada hasil yang terkesan dipaksakan.

Masyarakat merupakan subjek dari pembangunan. Suksesnya pembangunan di gampong tentu tidak terlepas dari peran *keuchik* (Kepala Desa), perangkat gampong dan sekaligus mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan yang dimaksud tidak hanya pembangunan berupa fisik (infrastruktur) semata, namun juga melihat pada pembangunan non fisik, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya.

Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 ibarat bayi yang baru lahir. Undang-Undang yang baru saja diimplementasi

¹ http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf di akses tanggal 11 November 2017.

di gampong pada tahun 2015 ini, tentu saja harus didukung oleh semua pihak agar implementasinya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, termasuk salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Pada tahun 2015, masyarakat Indonesia dan khususnya Aceh, telah merasakan dampak dari implementasi Undang-Undang ini. Pembangunan gampong yang dilaksanakan melalui kebijakan Undang-Undang yang dimaksud telah diimplementasikan secara nasional, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Pemerataan dan distribusi pembangunan yang dilakukan pemerintah hari ini telah menunjukkan tidak ada diskriminasi kedaerahan dan telah sesuai dengan porsi/kebutuhan.

Pembangunan tanpa partisipasi yang baik tidak akan berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu, penelitian terkait partisipasi dirasa penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengungkapkan dan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pasca lahir dan implementasi Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat tepatnya di Gampong Langung dan Gampong Peunaga Rayeuk. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014. Evaluasi program pembangunan penting untuk dilakukan agar pembangunan tidak kembali pada kegagalan.

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan berasal dari kata “*power*” yang dapat diartikan sebagai “tenaga, kemampuan atau kekuasaan”. Namun secara harfiah, “pemberdayaan” dapat diartikan sebagai peningkatan tenaga, kemampuan, kekuatan, atau kekuasaan.² Pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses yang terencana dan sistematis, yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, baik bagi individu dan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan

² Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Proyek *Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Wetlands International - Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. hlm. 51

potensi dan kemampuan yang terdapat dalam diri sendiri sehingga mampu melakukan transformasi sosial.³

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat level bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sendiri.⁴

Teori Partisipasi

Uphoff dan Cohen⁵ memberi makna partisipasi adalah masyarakat memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, Paul (1987)⁶ berpendapat bahwa dalam partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Brannstom⁷ mengemukakan partisipasi masyarakat adalah suatu proses sosial yang terjadi dalam suatu daerah tertentu, yang para penduduknya menangani keperluan dan kebutuhannya melalui partisipasi aktif dalam praktek maupun dalam pengambilan keputusan.

Memberikan peranan dan partisipasi yang lebih besar kepada suatu masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan, akan memberikan dampak yang positif, karena masyarakat tidak menjadi tergantung kepada program-program pemerintah yang bersifat menunggu instruksi atau *top down*. Masyarakat yang sifatnya

³ *Ibid.* hlm.52

⁴ *Ibid.* hlm 52

⁵ Dikutip oleh Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 296.

⁶ Disitir dalam Kannan 2002 dikutip oleh Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 297.

⁷ Dikutip oleh Soedibyo, D dan F. H. Habibie. 2005. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Daerah Wisata, Bintara (Bina Wisata Nusantara)." *Jurnal Ilmiah Pariwisata STP Trisakti*, Vol. 10, No. 3, pp. 264-275., hlm. 266

tergantung, hanya akan melaksanakan kegiatan pembangunan apabila masih ada program dari pemerintah. Setelah program pembangunan berakhir, masyarakat tidak lagi melaksanakan kegiatan pembangunan dan program akan berhenti dan tidak berkelanjutan.⁸

Menurut Bracht, ada beberapa indikator untuk mengukur keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Pengukuran tersebut dapat dilakukan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan partisipasi itu sendiri, yaitu:⁹

1. Memiliki kesempatan untuk memberikan saran dan pengambilan keputusan.
2. Besarnya dan lamanya waktu yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada sasaran.
3. Perwakilan penduduk dan kumpulan-kumpulan pimpinan yang terbentuk.
4. Tahap kepemilikan sosial yang dicapai,
5. Kepuasan atas proses-proses partisipasi,
6. Penilaian pencapaian maupun pengaturan sasaran-sasaran jangka panjang.

Menurut Marisa B. Guaraldo Chougil¹⁰ ada delapan tangga partisipasi masyarakat di negara-negara yang kurang berkembang yaitu: Pemberdayaan (*Empowerment*), Kemitraan (*Partnership*), Mendamaikan (*Conciliation*), Dissimulasi/Pura-pura (*Dissimulation*),

⁸ Soetomo, 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm 354-355.

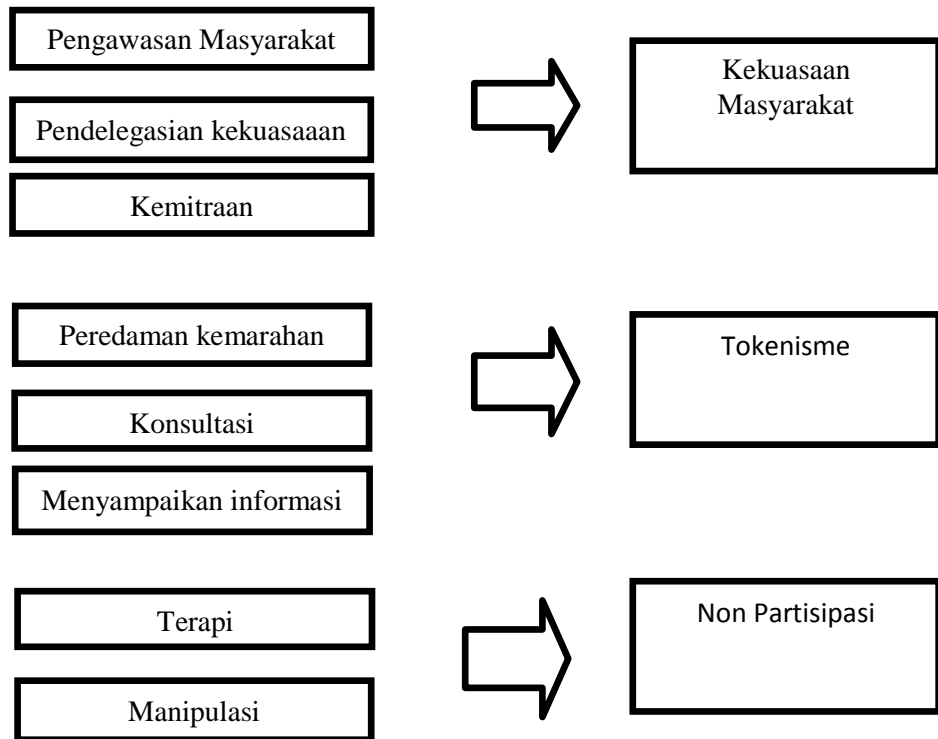
⁹ Dikutip oleh Soedibyo, D dan F. H. Habibie. 2005. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Daerah Wisata, Bintara (Bina Wisata Nusantara)." *Jurnal Ilmiah Pariwisata STP Trisakti*, Vol. 10, No. 3, pp. 264-275., hlm. 267

¹⁰ Dikutip oleh Kristianto, AW. 2009. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan ((Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*. hlm. 3

Diplomasi (*Diplomation*), Memberikan Informasi (*Informing*), Konspirasi (*Conspiration*), *Management* Diri Sendiri (*Self Management*).

Gambar 3.

Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat (Arnstein 1969 dalam Fegence, 1977)¹¹



Arnstein mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat akan mengikuti alur secara bertingkat, dari tangga pertama hingga tangga delapan, dengan logika sebagai berikut:

Tangga pertama adalah “manipulasi” atau penyalahgunaan serta tangga kedua adalah “terapi” (perbaikan). Manipulasi dan terapi sesungguhnya tidak termasuk di dalam konteks partisipasi. Masyarakat pada posisi ini hanyalah menjadi objek program yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah. Tangga ketiga adalah pemberian “informasi”, dilanjutkan tangga keempat “konsultasi”. Pemberian “informasi” dan “konsultasi” hanya formalitas semata, hanya untuk mendapatkan legitimasi publik saja.

¹¹ Sulistiyanti, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta. hlm.79.

Tangga kelima “penentruman”, merupakan suatu bentuk usaha untuk menampung ide, saran, masukan dari masyarakat, untuk sekedar meredakan keresahan. Tangga keenam baru dapat terjadi apa yang dikatakan dengan kemitraan dengan masyarakat, masyarakat telah mendapat tempat dalam suatu program pembangunan. Pada tangga ketujuh telah terjadi pelimpahan kewenangan oleh pemerintah kepada masyarakat. Terakhir, tangga kedelapan masyarakat telah mampu melakukan kontrol. Ketiga tangga tersebut termasuk dalam kategori tingkat kekuasaan masyarakat. Menurut taksonomi Arnstein tersebut, sebuah kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat hendaknya sampai menyentuh tangga 6,7, dan 8.¹²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, dengan lokasi dua gampong, yaitu Langung dan Peunaga Rayeuk yang berada di Kecamatan Meureubo. Selanjutnya, subyek penelitian adalah sumber-sumber untuk memperoleh informasi atau data-data penelitian. Adapun yang dijadikan subyek penelitian dalam penelitian ini adalah informan di dua gampong, yaitu Gampong Langung dan Peunaga Rayeuk. Sedangkan obyek penelitian ini adalah partisipasi masyarakat gampong dalam pembangunan pasca lahir dan implementasi Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014.

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan empat tahapan. Tahapan pertama yaitu observasi yang merupakan proses pengumpulan data dimana peneliti melihat dan mengamati langsung di lokasi penelitian.¹³ Dalam hal ini, Peneliti mencoba mengamati situasi sosial dan pola kehidupan masyarakat gampong dalam keseharian mereka, termasuk mata pencaharian mereka.

Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik

¹² Sulistiyanti, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta. hlm 79.

¹³ Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 81

penelitian.¹⁴ Tujuan dan perlunya dokumentasi ini adalah agar peneliti terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk topik penelitian. Dokumen-dokumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang ada di dua gampong yaitu Gampong Langung dan Gampong Peunaga Rayeuk. Adapun dokumen-dokumennya berupa profil gampong dan dokumen kegiatan gampong lainnya.

Berikutnya, dilakukan wawancara secara mendalam dan bersifat terbuka dengan informan. Tim peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan sebagai patokan dalam mewawancarai informan, namun sejumlah pertanyaan akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang baru dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Untuk menentukan informan, penulis menggunakan teknik *purposive*. Penelitian ini mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang mendalam dari berbagai informan tanpa berpatokan kepada besarnya jumlah informannya. Tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Adapun informannya adalah Keuchik Gampong Langung, Keuchik Gampong Peunaga Rayeuk, Sekretaris Gampong Langung, Sekretaris Gampong Peunaga Rayeuk, Tuha Peut Gampong Langung, Tuha Peut Gampong Peunaga Rayeuk dan tokoh masyarakat di dua gampong yang dianggap layak untuk memberikan informasi.

Sedangkan dalam menganalisis data, ada tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian kualitatif: (1) Reduksi data, (2) display data, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi.¹⁵

Tahapan di atas untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) *Reduksi data*. Tim peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari para informan tanpa harus membatasi informan untuk memberikan informasinya, semua informasi dicatat pada buku catatan dan direkam dengan menggunakan alat perekam suara. Berikutnya tugas peneliti adalah mengelompokkan informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

¹⁴ Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Penelitian*. Andi Offset. Yogyakarta. hlm. 2

¹⁵ Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung. hlm. 7

Pada proses ini peneliti juga melakukan pemilihan dan pemilahan antara informasi yang relevan dengan penelitian.

- b) Display data adalah penyajian data dan informasi yang telah terkumpul dalam bentuk matrik atau uraian yang memberikan kemudahan dalam memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. Terkait dengan penelitian ini data-data diperoleh akan peneliti sajikan dalam bentuk uraian setelah melalui proses reduksi data. Penyajiannya dikelompokkan berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dilapangan. Sehingga peneliti dapat dengan mudah menganalisis dan melihat apa yang sedang terjadi.
- c) Penarikan kesimpulan (verifikasi), proses pencarian arti/makna dari data yang terkumpul. Kesimpulan yang diperoleh memerlukan verifikasi selama penelitian dilakukan. Terkait dengan penelitian ini, peneliti selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang telah dihimpun. Melakukan *cross-check* kembali dengan berbagai sumber. Peneliti akan mengkonfirmasi kembali dengan berbagai pihak tentang hasil penelitian. Peneliti meminta pendapat, saran serta pendapat tentang kesimpulan sementara. Tetapi bukan berarti menghilangkan unsur obyektifitas hasil temuan peneliti dilokasi penelitian. Tanggapan berupa masukan, peneliti masukkan sebagai tambahan informasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di dua gampong di Kabupaten Aceh Barat, yaitu Gampong Langung dan Gampong Peunaga Rayeuk yang terletak di Kecamatan Meureubo. Peneliti memiliki alasan tersendiri mengapa memilih dua gampong ini untuk fokus melakukan penelitian. Menurut tim peneliti, dua gampong ini tentu saja memiliki keunggulan-keunggulan yang nantinya akan peneliti jelaskan pada paragraf berikutnya. Menurut penjelasan kepala desa (Keuchik) dari dua gampong ini mereka sama-sama mendapatkan dana desa/gampong dari pemerintah pusat dengan jumlah bervariasi yang disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing gampong sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014.

Kecamatan Meureubo juga merupakan salah satu kecamatan yang paling tinggi angka penduduknya di Aceh Barat yaitu berada pada peringkat yang kedua setelah Kecamatan Johan Pahlawan.

Kecamatan Johan Pahlawan yang menjadi ibukota Aceh Barat, berpenduduk 63,975 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Meureubo sebesar 30,253 jiwa. Dua kecamatan ini berdekatan dengan Kota Meulaboh sebagai pusat kota di Aceh Barat.¹⁶

Tim peneliti menilai penduduk dengan jumlah yang angka yang tinggi tentu saja memiliki dinamika dan situasi sosial yang beragam dan unik. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk fokus di Kecamatan Meureubo dengan memilih dua gampong yang telah peneliti sebutkan di atas, yaitu Gampong Langung dan Gampong Peunaga Rayeuk. Alasan memilih lokasi ini sudah sangat jelas: *pertama*, masing-masing gampong memiliki keunggulan-keunggulan masing-masing; *kedua*, jumlah angka penduduk yang tinggi kemudian memiliki dinamika sosial dan situasi sosial yang beragam dan unik. Berikut jumlah kepadatan penduduk yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: 1 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, 2016.¹⁷

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km2
Johan Pahlawan	32.32	1.425
Samatiga	7.67	108
Bubon	3.71	57
Arongan Lambalek	6.03	92
Woyla Woyla	6.85	54
Barat Woyla	3.92	63
Timur Kaway	2.34	35
XVI	10.94	42
Meureubo	15.29	268
Pante Ceureumen	5.80	23
Panton Reu	3.22	77
Sungai Mas	1.92	5
Aceh Barat	100.00	68

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015

¹⁶https://acehbaratkab.bps.go.id/admin1107/pdf_publicasi/Kabupaten-Aceh-Barat-Dalam-Angka-2017.pdf hal. 56

¹⁷ https://acehbaratkab.bps.go.id/admin1107/pdf_publicasi/Kabupaten-Aceh-Barat-Dalam-Angka-2017.pdf, diakses tanggal 5 Juni 2017.

Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat di Gampong Langung

Aceh memiliki kekhususan dalam penyebutan nama “desa”. Semenjak berlakunya otonomi khusus di Aceh, “desa” kemudian disebut dengan “gampong”, dan kepala desanya disebut dengan “keuchik”. Desa Langung maka akan disebut dengan “Gampong Langung” dan kepala desanya akan disebut dengan “keuchik”. Gampong Langung ini terletak di Kecamatan Meureubo yang tidak jauh dari pusat kota Aceh Barat yaitu Kota Meulaboh. Langung merupakan gampong penghasil kue khas Aceh. Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat dan sekitarnya, mereka sudah tidak asing lagi dengan Gampong Langung. Ketika disebut dengan kata Langung, masyarakat akan terbayang di sana terdapat produk unggulan yaitu kue khas Aceh. Kue khas Aceh akan selalu menjadi kebutuhan masyarakat Aceh. Mengapa demikian? Bagi masyarakat Aceh Barat dan sekitarnya, kue khas Aceh akan menjadi kebutuhan saat adanya “kenduri perkawinan”, “kenduri kematian” dan berbagai kegiatan adat lainnya. Tersedianya kue khas Aceh merupakan sebuah kehormatan dan kemuliaan bagi masyarakat Aceh Barat dan sekitarnya disaat pelaksanaan kenduri dan pelaksanaan kegiatan adat lainnya.

Di Gampong Langung, para wanita dan ibu-ibu disibukkan dengan proses pembuatan kue khas Aceh dengan toko-toko kue khas Aceh berjejeran di Gampong tersebut tepatnya di pinggir jalan negara. Mereka menjual berbagai varian kue khas Aceh dengan harga yang varian pula. Menurut penjelasan keuchik setempat, semangat berwirausaha masyarakat di Gampong Langung, khususnya perempuan telah berlangsung sejak lama. Potensi yang dimiliki kemudian terus dikembangkan di Gampong Langung untuk menghasilkan produk unggulan yaitu kue khas Aceh. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah, bahwa setiap gampong harus memiliki produk unggulan masing-masing yang kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat gampong sendiri dan juga masyarakat luar gampong. Perputaran ekonomi akan berjalan dengan baik, kemudian masyarakat juga akan menjadi sejahtera.

Menurut penjelasan keuchik yaitu bapak Muhammad Nur, Gampong Langung mendapatkan anggaran desa sejumlah Rp.700.000.000,- yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Gampong Langung. Jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat akan bervariasi dengan gampong-gampong yang

lain, jumlah anggaran yang diberikan akan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk Gampong Langung adalah 650 KK (kepala keluarga). Pembangunan Gampong Langung akan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: kategori pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial dan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan yaitu:

1. Pembangunan ruko (rumah toko) milik gampong yang kemudian dapat disewakan, pendapatan dari biaya sewa dapat kembali untuk kas gampong, penyewa ruko diutamakan bagi masyarakat Gampong Langung sendiri dengan tujuan untuk dapat membantu masyarakat gampong.
2. Pembangunan rumah sewa milik gampong, pendapatan dari biaya sewa juga dapat kembali untuk kas gampong. Rumah yang dibangun dapat disewakan untuk para pendatang atau mahasiswa, mengingat di Kecamatan Meureubo terdapat beberapa kampus (Universitas Teuku Umar, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh).
3. Pembangunan pintu gerbang/gapura gampong. Pintu gerbang ini berfungsi untuk memberikan tanda gampong, agar bagi para pendatang untuk tidak sulit menemukan Gampong Langung.
4. Pembangunan jalan gampong.
5. Pembangunan *drainase* gampong.
6. Rehabilitasi gedung PAUD, TK dan Posyandu.

Dana “desa” yang dikucurkan oleh pemerintah kepada setiap gampong yang ada di Aceh dan seluruh Indonesia, tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur semata, namun juga fokus pada pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Masalah dan situasi sosial dan ekonomi terkadang tidak kasat mata, hanya bagi masyarakat yang jeli saja yang mampu melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut beberapa program sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan di Gampong Langung, yaitu:

1. Program pemberdayaan masyarakat, berupa program memberikan dukungan dana bagi perempuan yang telah memiliki usaha sekaligus memiliki semangat berwirausaha. Seperti yang telah peneliti jelaskan di atas, Keuchik Gampong Langung juga fokus memberdayakan masyarakat gampong khususnya perempuan yang memiliki usaha sekaligus memiliki semangat berwirausaha. Gampong Langung memiliki usaha kue

khas Aceh yang menjadi produk unggulan Gampong Langung. Keuchik telah mengupayakan anggaran desa untuk mereka dengan sistem dana bergulir. Pada Tahun 2017, keuchik telah menganggarkan untuk usaha kue khas Aceh sebanyak Rp.30.000.000,- untuk 30 orang; artinya masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,-. Secara matematis jumlahnya memang sedikit, namun sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki usaha kue khas Aceh. Dana Rp.30.000.000,- ini akan terus berputar di Gampong Langung yang dikelola oleh pihak Gampong Langung. Menurut keuchik, kegiatan wirausaha ini sebenarnya adalah untuk memperkecil angka pengangguran dan angka kemiskinan di gampong, kegiatan ini langsung dibina oleh PKK Gampong Langung.

2. Kegiatan lainnya adalah berupa pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan menjahit. Kegiatan ini juga untuk membina masyarakat gampong yang memiliki minat di bidang menjahit atau yang telah memiliki usaha di bidang menjahit. Kegiatan ini juga berguna untuk membangkitkan semangat berwirausaha di masyarakat gampong dengan menjual jasa dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Langung.
3. Gampong Langung juga telah bekerjasama dengan masyarakat yang memiliki usaha budidaya ikan lele yang ada di Gampong Langung. Pihak gampong mencoba untuk memfasilitasi usaha mereka dengan mendukung dengan pendanaan dari gampong dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati. Program seperti merupakan salah satu kegiatan yang baik untuk menciptakan kemandirian gampong. Pendapatan dari bagi hasil/keuntungan dapat menjadi kas gampong yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan gampong, jika sewaktu-waktu pendanaan dari pemerintah pusat dihentikan. Program kerjasama ini akan terus berjalan, jika dilakukan dengan manajemen yang baik dan juga dapat dikembangkan ke program-program yang lain.

Gampong Langung telah mengukir beberapa prestasi pada kegiatan “Lomba Desa tahun 2014” baik ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Untuk ditingkat kabupaten tahun 2014 gampong Langung mendapatkan juara pertama dan untuk tingkat provinsi tahun 2014 juga mendapatkan juara pertama, sedangkan untuk tingkat nasional tahun 2014 gampong Langung mendapatkan juara harapan II. Salah satu produk unggulan yang diunggulkan saat diadakan perlombaan desa adalah kue khas Aceh. Prestasi yang

dicapai oleh Gampong Langung adalah berkat kerja keras masyarakat gampong dalam mengembangkan potensinya dan juga atas kerjasama berbagai elemen masyarakat baik di level elit gampong maupun anggota masyarakat di gampong.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pasca lahirnya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014, menunjukkan pada level kemitraan. Masyarakat gampong Langung telah mendapat tempat pada program pembangunan. Menurut Arnstein, ada delapan level partisipasi: *pertama*, manipulasi; *kedua*, terapi; *ketiga*, menyampaikan informasi; *keempat*, konsultasi; *kelima*, peredaman kemarahan; *keenam*, kemitraan; *ketujuh*, pendelegasian kekuasaan; dan *kedelapan*, pengawasan masyarakat.

Masyarakat gampong telah mampu menjadi mitra pemerintah gampong. Masyarakat dengan pemerintah dapat bekerjasama untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan. Masyarakat gampong Langung telah mendapatkan prestasi yang mengembirakan pada saat perlombaan gampong, baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional pada tahun 2014. Masyarakat gampong mampu menunjukkan produk unggulan gampong. Hal ini merupakan bukti kemitraan yang dibangun antara masyarakat dengan pemerintah gampong jauh sebelum Undang-Undang Desa itu lahir. Adanya partisipasi masyarakat gampong dalam setiap program pembangunan, sehingga menghasilkan prestasi yang baik.

Jika dilihat dari segi kerjasama dalam bidang bisnis/wirausaha, pemerintah Gampong Langung dengan masyarakat yang memiliki usaha/bisnis dapat bekerjasama dengan baik, misalnya saja pada program budidaya lele. Pemerintah gampong menyediakan modal dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan perjanjian bagi hasil usaha. Keuntungan dari kemitraan seperti ini adalah gampong mendapatkan pemasukan atau kas untuk gampong, masyarakat juga diuntungkan dari hasil usaha mereka sendiri.

Kemitraan lainnya adalah saat pembangunan infrastruktur gampong. Pembangunan infrastruktur gampong ditender kepada masyarakat gampong sendiri yang dikelola oleh kaur (Kepala Urusan) pembangunan gampong. Hal ini merupakan salah satu bentuk kemitraan dan pembangunan yang berbasis pada partisipasi

masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Pembangunan di gampong harus didukung oleh segala pihak baik eksternal maupun di internal gampong.

Masyarakat gampong Langung telah dilibatkan pada proses perencanaan pembangunan melalui rapat-rapat gampong dan musrenbang. Masyarakat telah dilibatkan dalam implementasi program, misalnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur gampong dan berbagai program pemberdayaan lainnya yang telah penulis sebutkan diatas. Keterlibatan masyarakat pada monitoring dan evaluasi dilakukan secara informal dengan dibangunnya sistem kontrol sosial yang telah ada di gampong. Sedangkan monitoring dan evaluasi secara formal dilakukan oleh pihak pemerintah gampong.

Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat di Gampong Peunaga Rayeuk

Peunaga Rayeuk merupakan gampong yang letaknya bersebelahan dengan Gampong Langung. Secara geografis, keadaan antara Peunaga Rayeuk dan Langung dapat dikatakan sama. Demikianpula dengan kondisi sosial dan budaya, mayoritas masyarakat di sini berbahasa Aceh dan Aneuk Jamee (Bahasa Aneuk Jamee adalah bahasa yang mirip dengan Bahasa Minang, sehingga Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bagi masyarakat yang berbeda suku di dua gampong ini). Ditinjau dari mata pencaharian, masyarakat gampong ini bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, pegawai pemerintah dan swasta. Gampong Peunaga Rayeuk saat ini dipimpin oleh Azhari Rahman. Keuchik Gampong Peunaga Rayeuk saat ini telah membangun komunikasi dan kerjasama dengan PT. Nasa (Natural Nusantara). Perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan obat-obat organik di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan yang tidak merusak dan mencemarkan lingkungan. PT. Nasa ini berpusat di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Komunikasi dan kerjasama ini mengantarkan pada beberapa uji coba pada lahan pertanian dan perikanan milik pribadi keuchik Gampong Peunaga Rayeuk, misalnya saja keuchik secara pribadi telah mencoba untuk perawatan pada tanaman cabe dan kolam lele. Angka kerusakan pada lahan cabe dapat diminimalisir dan angka

kematian pada budidaya Ikan Lele juga lebih sedikit dibanding sebelumnya. Menurut Keuchik Gampong Peunaga Rayeuk, obat-obatan organik ini sangat bermanfaat bagi masyarakat gampong yang bergerak di bidang usaha pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Angka gagal panen dapat diminimalisir dan tentu saja keuntungan jauh lebih besar.

Menurut keuchik, beliau mencoba membangun kerjasama ini untuk kepentingan gampong, tidak hanya untuk lahan pertanian dan perikanan dirinya sendiri. Sebelum beliau mensosialisasikan secara formal kepada masyarakat gampong, beliau telah melakukan uji coba di usaha pertanian dan perikanan sendiri. Menurut beliau masyarakat akan sulit menerima sesuatu hal yang baru, jika kita sebagai pimpinan gampong tidak memberikan bukti dan contohnya.

Berikutnya tim peneliti juga mencoba wawancara dengan Sekretaris Gampong dan *Tuha Peut* Gampong Peunaga Rayeuk. *Tuha Peut* merupakan perangkat gampong yang berfungsi sebagai legislatif di gampong, layaknya anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Menurut Edi Zulmaidi sebagai Sekretaris Gampong saat ini, beliau memberikan informasi bahwa program pembangunan gampong saat ini dibagi pada dua bagian, yaitu: pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial ekonomi.

Pembangunan Infrastruktur saat ini telah dilakukan di gampong adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan gampong.
2. Pembangunan *Drainase*.
3. Rehab gedung PAUD.
4. Pembangunan rumah sewa milik gampong sejumlah empat rumah. Pembangunan rumah sewa ini sangat bermanfaat bagi gampong. Hasil atau biaya sewa dapat menjadi kas untuk gampong yang kemudian dapat bermanfaat bagi pembangunan gampong, jika sewaktu-waktu pemerintah tidak lagi memberikan dana yang begitu besar untuk pembangunan gampong. Artinya gampong telah memiliki pendapatan sendiri sekaligus mandiri dan tidak terlalu berharap pada bantuan pemerintah.

Program pembangunan di gampong ini dikendalikan oleh Kaur (Kepala Urusan) pembangunan melalui proses tender yang dilakukan di Gampong Peunaga Rayeuk. Yang berhak ikut tender

adalah masyarakat Gampong Peunaga Rayeuk. Hal ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat gampong, sekaligus dapat masyarakat berpartisipasi dan bermitra dalam pembangunan infrastruktur di gampong tersebut. Untuk Gampong Peunaga Rayeuk, anggaran yang diberikan oleh pemerintah secara keseluruhan berjumlah Rp.952.600.000,-. Anggaran ini disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada, semakin tinggi jumlah penduduk, maka anggaran yang di berikan akan semakin tinggi mencapai Rp.1 Milyar.

Terkait program pemberdayaan masyarakat, keuchik bersama aparaturnya sedang mengembangkan usaha budidaya Ikan Lele. Jika di Langung ada kue khas Aceh, maka di Peunaga Rayeuk dikembangkan program budidaya Ikan Lele yang di fokuskan pada ibu-ibu rumah tangga. Untuk tahun ini, Gampong Peunaga Rayeuk memilih 27 ibu rumah tangga untuk pelaksanaan program budidaya ikan lele ini. Pemerintah gampong sedang berencana untuk mengembangkan “lele asap” yang akan dijadikan sebagai produk unggulan gampong, seperti yang telah dilakukan oleh Gampong Langung dengan Kue Khas Aceh sebagai produk unggulannya.

Sebelum dikembangkan ke program “lele asap”, maka terlebih dahulu akan dikembangkan budidaya Ikan Lele sebagai bahan bakunya, sekalipun saat ini program “lele asap” masih pada tahap wacana gampong, namun telah disosialisasikan kepada masyarakat. Budidaya Ikan Lele akan dikembangkan tahun ini, mengingat permintaan pasar terhadap kebutuhan Ikan Lele di wilayah Aceh Barat masih tergolong tinggi. Mengenai kebutuhan obat-obatan untuk budi daya lele, keuchik telah membangun jaringan dengan PT.NASA. Obat-obatan dari PT. NASA merupakan obat-obat natural yang ramah terhadap lingkungan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di gampong Peunaga Rayeuk dinilai baik yaitu telah mencapai level “kemitraan”. Kemitraan yang terbangun juga dapat dinilai saat pembangunan infrastruktur. Pemerintah gampong melalui kaur pembangunan telah membuka tender untuk pembangunan infrastruktur gampong, masyarakat gampong dapat berpartisipasi untuk membangun gampong mereka sendiri, selain itu masyarakat gampong juga terberdayakan dengan adanya proses tender yang mengutamakan masyarakat sendiri. Artinya, pemerintah gampong sangat besar

harapannya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Proses pembangunan yang dilakukan juga dapat menguntungkan berbagai pihak, yaitu pelaksana pembangunan, pemerintah gampong dan juga masyarakat umum. Kontrol sosial dalam setiap pembangunan dilakukan oleh masyarakat gampong sendiri secara informal sekalipun tidak melupakan monitoring dan evaluasi dari pemerintah gampong secara formal, karena anggaran yang digunakan dalam pembangunan merupakan anggaran/dana publik, tentu saja harus ada keterbukaan terhadap publik pula.

Kemitraan lainnya adalah keuchik telah membangun komunikasi dengan para ibu-ibu rumah tangga terkait dengan program “lele asap”, namun terlebih dahulu akan dibangun program “budi daya lele” sebagai bahan bakunya. Selain itu kebutuhan lele di wilayah Aceh Barat juga sangat tinggi. Program ini akan dikelola oleh para ibu-ibu rumah tangga. Mengapa harus ibu-ibu rumah tangga? Menurut Keuchik, *Pertama*, program khusus untuk ibu-ibu rumah tangga merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan perempuan sekaligus untuk keterlibatan perempuan dalam setiap program pembangunan. *Kedua*, ibu-ibu rumah tangga biasanya akan banyak menghabiskan waktu di rumah dan menurutnya akan lebih fokus dalam mengelola budi daya lele.

Pada proses perencanaan pembangunan juga tidak melupakan keterlibatan masyarakat gampong, masyarakat dilibatkan melalui rapat-rapat gampong dan musrenbang, begitu juga pada implementasi pembangunan, masyarakat ikut terlibat dan menjadi subjek dari pembangunan, misalnya pada pembangunan infrastruktur dan berbagai program pemberdayaan lainnya yang sedang diwacanakan oleh pihak pemerintah gampong. Mengenai evaluasi dan monitoring masyarakat dapat melakukan secara informal seperti yang telah penulis sebutkan diatas.

D. Kesimpulan

Kemandirian gampong merupakan harapan dari semua pihak. Program pembangunan yang di wujudkan oleh pemerintah melalui kebijakannya yaitu Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 patut di apresiasi dan didukung. Negara telah mulai membangun dari gampong (desa), karena gampong sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan dirinya. Hanya saja perlu pembinaan-pembinaan untuk mengungkap dan mengembangkan potensi-potensi yang telah ada. Mengembangkan potensi tersebut

dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan masyarakat salah satu melalui kebijakan Undang-Undang Desa.

Ada hal yang penting untuk tidak kita lupakan, bahwa program pembangunan harus mengacu pada partisipasi masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak menjadi sangat penting. Tanpa partisipasi masyarakat, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan kemandirian masyarakat gampong juga tidak akan terwujud. Masyarakat hanya akan menjadi objek dari sebuah program pembangunan, padahal konsep pembangunan adalah masyarakat harus menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Jika kemandirian telah terbentuk digampong, maka negara tidak perlu lagi mengucurkan anggaran yang begitu besar untuk pembangunan gampong. Mengapa? Karena gampong telah mampu mengembangkan potensinya. Badan-badan usaha milik gampong telah mampu menjalankan usahanya, masyarakat gampong telah memiliki usaha-usaha sendiri, maka kesejahteraan masyarakat telah terwujud.

Gampong Langung memiliki potensi yang besar. gampong yang berada di wilayah pedesaan pesisir ini, memiliki keunggulan-keunggulan yang sedang dikembangkan dan diwacanakan, program-program pembangunan telah dijalankan baik pembangunan infrastruktur desa maupun non infrastruktur. Mengenai partisipasi, telah terjalin kemitraan antara pemerintah gampong dengan masyarakat gampong. Masyarakat mampu bekerjasama dengan pemerintah gampong, salah satunya dalam bidang usaha perikanan dengan menerapkan konsep bagi hasil usaha. Masyarakat menjadi mitra dalam pembangunan infrastruktur di gampong, misalnya dalam proses tender. Selain itu, masyarakat juga terus mengembangkan potensi usahanya di bidang pembuatan kue khas Aceh. Pemerintah gampong mendukung dengan pemberian dana pinjaman secara bergilir. Hal ini menunjukkan kerjasama yang baik antara pemerintah gampong dengan masyarakat.

Begitu juga yang telah dilakukan oleh Gampong Peunaga Rayeuk yang lokasinya bersebelahan dengan gampong Langung. Kemitraan telah terbangun dengan baik, misalnya pada proses tender pembangunan infrastruktur di gampong yang melibatkan masyarakat. Wacana program “lele asap” yang telah di sosialisasikan kepada masyarakat dengan terlebih dahulu akan dikembangkan program budi daya lele yang melibatkan perempuan yaitu ibu-ibu

rumah tangga. Gampong Langung dan Peunaga Rayeuk telah melibatkan masyarakat pada perencanaan program pembangunan melalui rapat-rapat gampong, implementasi program pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan secara informal.

Daftar Rujukan

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Penelitian*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kristianto, AW. 2009. "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan ((Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)."
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Wetlands International - Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor
- Soediby, D dan F. H. Habibie. 2005. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Daerah Wisata, Bintara (Bina Wisata Nusantara)." *Jurnal Ilmiah Pariwisata STP Trisakti*, Vol. 10, No. 3, pp. 264-275.
- Soetomo, 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sulistiyanti, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta.